

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PRAKTIK KETERLIBATAN POLITIK DI INDONESIA

Bening Mujianti Rahayu

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

beningmujianti283@gmail.com

Yuyu Yuhana

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

yuhana@untirta.ac.id

Maman Fathurrohman

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

mamanf@untirta.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the extent of citizen involvement in political activities and socialisation in everyday life and how to implement it. This article uses a literature study type of research where previous research that has been collected will be compiled, analysed and then concluded so as to get observations about the material under study. The conclusion of this research includes all Indonesian citizens who participate in political practices and socialisation in every daily activity, one of which is by using a case-based learning system, and how teenagers use social media responsibly, then ordinary people who involve themselves with democracy through voting and expressing their opinions wisely in accordance with the teachings of Civic Education and Pancasila.

Keywords: *Pancasila, Civic Education, Politics*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan warga negara dalam kegiatan politik dan sosialisasi dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana mengimplementasikannya. Pada artikel ini menggunakan jenis penelitian studi literatur yang dimana Penelitian terdahulu sebelumnya sudah terkumpul akan dikompilasikan, dianalisa lalu disimpulkan sehingga mendapatkan hasil observasi mengenai materi yang diteliti. Kesimpulan pada penelitian ini mencakup seluruh warga negara Indonesia yang mengikutsertakan pada praktik politik dan sosialisasi pada setiap aktivitas sehari-hari, salah satunya dengan menggunakan system pembelajaran berbasis kasus, dan bagaimana remaja menggunakan sosial media yang bertanggung jawab, lalu masyarakat biasa yang melibatkan diri dengan berdemokrasi melalui voting dan mengutarakan pendapatnya secara bijak sesuai dengan ajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila.

Kata Kunci: *Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Politik*

PENDAHULUAN

Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan tentang hak, tanggung jawab, dan kewajiban kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk memungkinkan individu untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses demokrasi dan merupakan komponen penting dari masyarakat yang demokratis. Secara konseptual, tujuan PKn adalah untuk mempersiapkan generasi muda menjadi warga negara yang baik, warga negara yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam komunitas mereka¹, namun Pendidikan kewarganegaraan (PKN) tidak harus hanya sebatas instrumen kebanggaan bagi penguasa tetapi harus digunakan sebagai instrumen yang membantu dalam perkembangan bangsa dan negara di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia merupakan aspek penting dalam sistem pendidikan Indonesia, Pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan ke dalam kurikulum sekolah, yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman siswa tentang hak-hak, tanggung jawab, dan peran mereka sebagai warga negara. Kurikulum ini mencakup topik-topik seperti hak asasi manusia, nilai-nilai konstitusional dan moralitas Indonesia, integrasi nasional, dan pendidikan kewarganegaraan global. Namun, ketika diimplementasikan di sekolah-sekolah menjadi pembelajaran yang dangkal, karena terfokus pada ingatan akan pengetahuan bukan pada berpikir kritis dan pemberdayaan. Siswa cenderung lebih fokus pada sains dan matematika daripada pendidikan kewarganegaraan. yang menyebabkan mereka tidak terlibat dalam prinsip-prinsipnya². Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia bertujuan untuk mempelajari nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan demokratis, dan keyakinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia menekankan pada pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk memberdayakan warga negara dalam membangun masyarakat Indonesia yang demokratis, menghargai hak asasi manusia, taat hukum, dan berwawasan internasional. Namun, pendidikan kewarganegaraan sering kali digunakan sebagai alat indoktrinasi dan hegemoni, bukan sebagai alat pendidikan yang mencerminkan kepentingan pihak-pihak yang berkuasa dalam masyarakat. Indonesia menghadapi beberapa masalah politik, termasuk korupsi yang sistematis, diskriminasi dan kekerasan terhadap etnis minoritas, penggunaan agama dan politik identitas. Politik uang dan pembelian suara terus merasuki pemilihan umum di semua tingkatan dan merupakan hambatan utama bagi terwujudnya masyarakat yang demokratis.

Di Indonesia sendiri tingkat integrasi politik untuk tingkat lokal bervariasi, yang dapat dipengaruhi oleh karakteristik lokal seperti keragaman agama dan etnis. Indonesia adalah negara yang sangat beragam, dan keragaman integrasi politik di tingkat lokal sangat penting bagi kualitas pemerintahan oleh rakyat. Perbedaan antara individu dan kelompok terkadang menimbulkan konflik. Namun, perbedaan tidak membuat kita tercerai-berai, justru dengan perbedaan kita bisa sama-sama mempererat tali persaudaraan, persatuan dan kesatuan dalam

¹ Sunarso, M. S. The Dynamics of Civic Education within the Schools in Indonesia: A Study of Educational Politics and Curriculum in Three Orders.

² Japar, M. (2018). The improvement of Indonesia students 'engagement in civic education through case-based learning'. Journal of Social Studies Education Research, 9(3), 27-44.

bermasyarakat dan bernegara³. Identitas kewarganegaraan dalam pendidikan kewarganegaraan di sini terutama dipahami sebagai warga negara yang setia dan patriotik, dengan penekanan pada kebaikan bagi warga negara dan masyarakat. Karakteristik warga negara yang loyal dan patriotik ini menjadi tantangan ketika hukum dan praktik-praktik yang tidak demokratis tumbuh subur di masyarakat dan penekanan ini muncul sebagai tantangan untuk menciptakan kewarganegaraan demokratis yang kritis dan berdaya, yang dapat berkontribusi pada demokrasi Indonesia⁴.

Sebuah studi yang dilakukan di sebuah sekolah menengah umum di Jakarta, Indonesia, menemukan bahwa pembelajaran berbasis kasus dalam pendidikan kewarganegaraan mengubah praktik pengajaran dengan meningkatkan keterlibatan siswa dan pernyataan kritis. Pendekatan ini menantang siswa untuk memecahkan masalah yang dekat dengan kehidupan mereka dengan menggunakan isu-isu yang dilaporkan dalam berita, dan siswa serta kelompok diberi kesempatan untuk mencari dan menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.⁵ Studi kasus menunjukkan penggunaan metode pengajaran yang inovatif, seperti pembelajaran berbasis kasus, untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Studi-studi ini menyoroti pentingnya pendekatan pembelajaran aktif yang mendorong pemikiran kritis dan keterlibatan siswa dalam pendidikan kewarganegaraan.

Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dibahas mengenai keterlibatan politik masyarakat Indonesia dalam implementasian Pendidikan Kewarganegaraan dengan tujuan melihat sejauh mana keterlibatan tersebut dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

METODE

Pada Penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa studi literatur atau tinjauan Pustaka. Studi literatur dapat dilakukan dengan mengumpulkan daftar Pustaka yang terdiri dari beberapa penelitian terdahulu dan menarik kesimpulan dari penelitian-penelitian tersebut secara bersama-sama.⁶ Dengan demikian, tinjauan literatur dari proses evaluasi, yang memberikan dasar yang kuat untuk memahami, menganalisis, dan menafsirkan fenomena yang kompleks, serta menginformasikan pengambilan keputusan berbasis bukti di berbagai disiplin ilmu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam proses mengkaji literatur tentang keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik dan sosialisasi di Indonesia terdapat beberapa hasil yang menerangkan bahwa murid-murid diikutsertakan dengan melakukan kegiatan belajar berbasis kasus, pekerja negeri terdapat tes kewarganegaraan yang menunjukkan seberapa besar pengetahuan dan keterampilan, sikap dan sifat dalam berperilaku berkewarganegaraan yang baik dan benar, sedangkan dalam masyarakat biasa keterlibatannya lebih mencakup dalam bagaimana mereka bersikap dan

³ Refni, N., & Abdul, R. (2022). Integrasi Politik di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Ilmiah Politik*, 22(1), 1-15.

⁴ Lydersen, K. M. (2011). *Democratic Citizenship Education in Indonesia post-Suharto: Political Indoctrination or critical democratization?: A case study of civic education in Yogyakarta, Indonesia* (Master's thesis).

⁵ Japar, M. (2018). The improvement of Indonesia students 'engagement in civic education through case-based learning'. *Journal of Social Studies Education Research*, 9(3), 27-44.

⁶ Mardalis. (1999). *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.

berperilaku terhadap sesama dalam bersosialisasi. Dengan itu pada artikel ini akan dijelaskan lebih dalam dan dibahas secara luas mengenai keterlibatan seluruh warga negara Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan upaya untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar mengenai hubungan antara warga negara dengan negara dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara, dan secara umum bertujuan untuk membina manusia Indonesia agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa⁷. Pendidikan kewarganegaraan sangat erat kaitannya dengan karakter seseorang dan bertujuan untuk membina masyarakat yang bermoral dan berbudi pekerti luhur, seperti yang tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah tujuan agar negara ini selalu terintegrasi tanpa perpecahan. Pendidikan kewarganegaraan memainkan peran penting dalam mempromosikan integrasi nasional di Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan, Mereka adalah program studi yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui koridor "pendidikan berbasis nilai"⁸. Hal ini merupakan langkah strategis untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan semangat patriotisme, serta meningkatkan kemampuan partisipasi kewarganegaraan bagi para pelajar, khususnya mahasiswa yang cenderung memiliki pengaruh positif dan berperan sebagai kontrol sosial⁹. Tujuan utama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan harus berfokus pada peningkatan nasionalisme, mengeksplorasi isu-isu nasional dan, di bawah semboyan bhinneka tunggal ika, memberikan materi teori satu arah bagi siswa untuk mengamati, merasakan, dan menyuarakan apa yang telah mereka alami dalam rangka mencapai tujuan utama tersebut dengan semangat sesama anak bangsa yang hidup berdampingan secara damai dalam keragaman.

Kesediaan untuk hidup berdampingan dan bersatu berdasarkan dialektika sejarah dan kesamaan visi serta kepentingan masa depan dengan nilai-nilai kesetaraan, keadilan, demokrasi yang disandingkan dengan nilai-nilai ketuhanan dan persatuan¹⁰. Namun hidup berdampingan dengan berbagai macam perbedaan dapat menimbulkan konflik-konflik yang tidak dapat dihindarkan, oleh karena itu warga negara memiliki kewajiban untuk menaati peraturan dan regulasi yang dibuat oleh negara. Diperlukan nilai-nilai yang dapat memotivasi, menginspirasi, dan menyatukan mereka dalam mewujudkan tujuan bersama¹¹. Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai luhur yang diambil dari akar budaya tanah air, yang mengintegrasikan semua elemen tanah air untuk mewujudkan cita-cita negara.

Pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat menghasilkan warga negara yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara, dengan menjaga keutuhan bangsa, mampu dan

⁷ Refni, N., & Abdul, R. (2022). Integrasi Politik di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Ilmiah Politik*, 22(1), 1-15.

⁸ Budimansyah D. (2011). *Pendidikan Karakter: Nilai Inti Bagi Upaya Pembinaan Kepribadian Bangsa*. Bandung: Widaya Aksara Press dan Laboratorium PKn UPI

⁹ Jamalong, B. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan dan Implementasinya dalam Membentuk Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(2), 159-172.

¹⁰ Soebhan, M., dkk. (2017). *Integrasi Bangsa: Mencari Format Baru untuk Indonesia*. Jakarta: Kompas Gramedia.

¹¹ Kristiadi, J. dkk. (2020). *Ancaman Radikalisme dalam Negara Pancasila*. Jakarta: Kanisius.

mau hidup rukun dalam masyarakat Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika¹². Tidak terbatas pada masalah etnosentrisme, ada banyak kontroversi dan masalah kewarganegaraan dalam konteks lokal, dan yang paling umum adalah masalah SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Sikap seperti itu dapat menimbulkan konflik dan harus dihilangkan. Sementara itu, rasa nasionalisme dan patriotisme harus terus dipupuk dan ditanamkan kepada warga negara muda. Upaya bela negara harus dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, dari ancaman dan sabotase terhadap keutuhan bangsa dan negara. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam maupun luar negeri, yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, pertahanan, dan keamanan negara¹³.

Menurut Ki Hajar, pendidikan nasional harus berdasarkan kebudayaan nasional, harus bertujuan untuk mempertinggi derajat bangsa dan rakyatnya serta mendorong pengembangan kerja sama yang saling menguntungkan dengan bangsa lain¹⁴. Hasilnya, dalam proses belajar-mengajar, diperkenalkan model pengajaran yang membantu siswa meningkatkan potensi mereka secara keseluruhan untuk menjadi warga negara yang cerdas, baik, bersemangat untuk berpartisipasi, warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab¹⁵. *Case-based learning* berhasil meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik pemula¹⁶. Pembelajaran Berbasis Kasus dalam Pendidikan Guru Pendidikan Jasmani (CBL) telah terbukti mendorong pemikiran kritis dan berpotensi berkontribusi. Hal ini mempengaruhi perkembangan kognitif siswa dan nilai-nilai siswa¹⁷. Tujuan CBL adalah untuk mempersiapkan mahasiswa dalam praktik klinis dengan menggunakan kasus klinis asli. Kasus klinis asli yang menghubungkan teori dan praktik serta menyumbangkan pengetahuan pada kasus-kasus tersebut¹⁸.

Indonesia juga telah mengalami polarisasi dan kemerosotan demokrasi sejak tahun 2014. Negara ini menjadi lebih terpolarisasi secara politik, dan kebangkitan politik identitas dan politik uang terus merembes ke dalam pemilu di semua tingkatan. Dominasi "partai kendaraan" dalam lanskap politik, yang tidak memiliki basis ideologis yang jelas dan meminimalkan pengambilan keputusan teknokrat di sela-sela pemilu, adalah masalah lain. Keterlibatan politik generasi muda juga menjadi faktor penting bagi demokrasi seperti Indonesia. Namun hal ini menghadirkan tantangan psikologis bagi generasi muda. Penelitian

¹² Setiawan, D. (2018). Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Karakter dan Partisipasi Warga Negara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

¹³ Seriwati, et al. (2023). Kontroversi dan Masalah Kewarganegaraan dalam Konteks Lokal: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(1), 1-15.

¹⁴ Ubaedillah, A. (2018). Civic education for Muslim students in the era of democracy: Lessons learned from Indonesia. *The Review of Faith & International Affairs*, 16(2), 50-61.

¹⁵ Larry, H., & Narvaez, D. (2014). *Character Education in the 21st Century: A Framework for Comprehensive School Reform*. New York: Routledge.

¹⁶ Cevik, O. (2013). The Effect of Case-Based Learning on Problem Solving Skills of Novice Students. *Educational Research and Reviews*, 8(10), 725-732.

¹⁷ Hemphill, M. A., R Richards, K. A., Gaudreault, K. L., & Templin, T. J. (2015). Pre-service teacher perspectives of case-based learning in physical education teacher education. *European Physical Education Review*, 21(4), 432-450.

¹⁸ McLean, S. F. (2016). Case-based learning and its application in medical and health-care fields: a review of worldwide literature. *Journal of medical education and curricular development*, 3, JMECD-S20377..

bertujuan untuk mengetahui tingkat keterlibatan politik generasi muda dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Media sosial telah menjadi alat yang ampuh bagi pemilih muda Indonesia untuk terlibat dalam sistem politik, dan mereka terpinggirkan. Media sosial di Indonesia telah menjadi alat penting bagi partai politik dan politisi untuk berinteraksi dengan konstituen mereka, meningkatkan popularitas dan memenangkan suara, dan media sosial yang sarat dengan suara anak muda telah memberikan dampak yang signifikan terhadap keterlibatan politik di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Pertumbuhan media sosial di negara ini telah berkontribusi pada peningkatan partisipasi politik online, menyediakan platform unik untuk mendiskusikan isu-isu politik dan menumbuhkan rasa saling memiliki di antara individu-individu yang berpikiran sama.

Pertama, anonimitas di media sosial kemungkinan besar digunakan oleh netizen untuk mengekspresikan pendapat mereka tentang isu-isu sensitif dan kontroversial untuk menghindari pembalasan atau reaksi sosial, hukum, atau jenis reaksi lainnya. Kedua, anonimitas dan partisipasi politik netizen dapat bervariasi tergantung pada platform media sosial yang mereka gunakan, dan hal ini akan mempengaruhi partisipasi politik mereka. Ketiga, karena adanya risiko sanksi sosial, hukum, dan jenis sanksi lainnya, warga negara tidak diperbolehkan menggunakan media sosial untuk mengekspresikan pandangan mereka secara langsung, tetapi melalui pernyataan lain, seperti kutipan, tautan, repost, dan lain-lain¹⁹.

Bentuk-bentuk keterlibatan politik kaum muda dengan menggunakan media sosial untuk mengubah dari tradisional offline menjadi online (daring)²⁰. Salah satu contoh Keterlibatan politik adalah perdebatan di kalangan anak muda tentang transformasi kebijakan publik, Keterlibatan publik tidak lagi dilakukan di tempat-tempat tertentu, tetapi secara berani melalui forum diskusi online. Melalui forum diskusi online. Usia mempengaruhi keterlibatan politik²¹. Semakin tua usia seseorang, semakin mereka menjadi terlibat secara politik. Untuk dapat memberikan suara dalam pemilu, anak muda memiliki usia yang lebih muda, Oleh karena itu, mereka memiliki lebih banyak keterlibatan politik²². Selain usia, pendidikan juga mempengaruhi keterlibatan politik. Mereka yang berpendidikan tinggi memiliki partisipasi politik yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang baru saja mengenyam pendidikan dibandingkan dengan mereka yang tidak berpendidikan SMA²³.

KESIMPULAN

Pembelajaran berbasis kasus dalam pendidikan kewarganegaraan memberikan kesempatan bagi guru untuk menembus minat terhadap hak asasi manusia siswa. Pembelajaran berbasis kasus dapat mengembangkan pengetahuan diri dan mengidentifikasi asumsi-asumsi sendiri (Martijn et al., 2016). Selain itu, kerja sama antara sekolah pendidikan dan budaya di sekolah dapat dicapai melalui pembelajaran berbasis kasus. Untuk mengurangi konflik, kita

¹⁹ Pulung, I. G. N. A. M., et al. (2018). Anonymity and Political Participation on Social Media: A Study of Indonesian Netizens. *International Journal of Frontiers in Sociology*, 22(2), 1-15.

²⁰ Tonton, H., Suyanto, S., & Gunawan, I. (2015). Bentuk-bentuk Keterlibatan Politik Kaum Muda Melalui Media Sosial. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-12.

²¹ McDonald, P. F. (2021). The Political Engagement of Young People. *Annual Review of Political Science*, 24(1), 401-419.

²² Levy, J., & Akiva, T. (2019). The Effect of Age on Political Participation: A Meta-Analysis. *Political Psychology*, 40(5), 981-1004.

²³ McDonald, P. F. (2021). The Political Engagement of Young People. *Annual Review of Political Science*, 24(1), 401-419.

perlu meningkatkan pemahaman kita tentang hak asasi manusia dan hubungan di antara keduanya. Pembelajaran berbasis kasus juga merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Berdasarkan hasil penelitian, pembelajaran berbasis kasus dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru. Selain itu, guru juga dapat lebih memahami dan menghargai siswa sebagai objek pembelajaran.

Untuk mencegah dampak negatif dari etnosentrisme, pendidikan kewarganegaraan sebagai instrumen pendidikan sangat diperlukan. Pendidikan kewarganegaraan harus mengupayakan dan mengembangkan bagaimana siswa menyadari bahwa keragaman itu penting, serta meningkatkan pengetahuan siswa.

Masyarakat membutuhkan Bimbingan untuk memahami, menyadari bahwa mereka diajak untuk mendalami politik atau mengenal kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, melaksanakan dan berkomitmen terhadap keberadaan mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfaruqy, M. Z., & Padmonurcahyo, A. (2023). What Drives Political Engagement of the Young Generation? A Political Psychology Study. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 5(1), 36-46.
- Binder, A., Heiss, R., Matthes, J., & Sander, D. (2021). Dealigned but mobilized? Insights from a citizen science study on youth political engagement. *Journal of Youth Studies*, 24(2), 232-249.
- Budimansyah D. (2011). *Pendidikan Karakter: Nilai Inti Bagi Upaya Pembinaan Kepribadian Bangsa*. Bandung: Widaya Aksara Press dan Laboratorium PKn UPI.
- Cevik, O. (2013). The Effect of Case-Based Learning on Problem Solving Skills of Novice Students. *Educational Research and Reviews*, 8(10), 725-732.
- Fortuna, R., & Khadir, A. (2022). The Role of Civic Education in the Integration of the Indonesian Nation. *Jurnal Pendidikan Amarta*, 1(1), 1-5.
- Hemphill, M. A., R Richards, K. A., Gaudreault, K. L., & Templin, T. J. (2015). Pre-service teacher perspectives of case-based learning in physical education teacher education. *European Physical Education Review*, 21(4), 432-450.
- Jamalong, B. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan dan Implementasinya dalam Membentuk Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(2), 159-172.
- Japar, M. (2018). The improvement of Indonesia students 'engagement in civic education through case-based learning'. *Journal of Social Studies Education Research*, 9(3), 27-44.
- Karim, Abdul. (2012). Public Administration and Governance: Tradition and Transformation. *International Conference: The University of Philippines National College of Public Administration and Governance*.
- Kristiadi, J. dkk. (2020). *Ancaman Radikalisme dalam Negara Pancasila*. Jakarta: Kanisius.
- Larry, H., & Narvaez, D. (2014). *Character Education in the 21st Century: A Framework for Comprehensive School Reform*. New York: Routledge.

- Levy, B. L., & Akiva, T. (2019). Motivating political participation among youth: An analysis of factors related to adolescents' political engagement. *Political Psychology*, 40(5), 1039-1055.
- Lydersen, K. M. (2011). *Democratic Citizenship Education in Indonesia post-Suharto: Political Indoctrination or critical democratization?: A case study of civic education in Yogyakarta, Indonesia* (Master's thesis).
- Mardalis. (1999). *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Martijn, E., Meijer, P. C., & Snijders, C. (2016). Human rights education in the Netherlands: A case study approach. In *Human Rights Education in the 21st Century* (pp. 149-164). Springer,
- McDonald, P. F. (2021). The Political Engagement of Young People. *Annual Review of Political Science*, 24(1), 401-419.
- McLean, S. F. (2016). Case-based learning and its application in medical and health-care fields: a review of worldwide literature. *Journal of medical education and curricular development*, 3, JMECD-S20377.
- Muharji, I. (2014). Civics and Citizenship Teaching in Indonesia. *Ethos*, 22(3), 34-37.
- Perbawani, P. S., Rahayu, R., & Anshari, I. N. (2018). Online political participation and Netizen anonymity in Indonesia's digital democracy. *PCD Journal*, 6(2), 185-212.
- Pontes, A., Henn, M., & Griffiths, M. D. (2018). Towards a conceptualization of young people's political engagement: A qualitative focus group study. *Societies*, 8(1), 17.
- Pulung, I. G. N. A. M., et al. (2018). Anonymity and Political Participation on Social Media: A Study of Indonesian Netizens. *International Journal of Frontiers in Sociology*, 22(2), 1-15.
- Seriwati, et al. (2023). Kontroversi dan Masalah Kewarganegaraan dalam Konteks Lokal: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(1), 1-15.
- Soebhan, M., dkk. (2017). *Integrasi Bangsa: Mencari Format Baru untuk Indonesia*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Sukino JA, Sulha. (2020). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi* (Cet. 2). Depok: Rajawali Pers
- Sunarso, M. S. *The Dynamics of Civic Education within the Schools in Indonesia: A Study of Educational Politics and Curriculum in Three Orders*.
- Suneki, S., Larasati, E., Yuwanto, Y., & Fitriyah, F. (2021, March). Political Education as the Civic Application Engagement for Strengthening Democracy (The Case Study in Grobogan Regency). In *Proceedings of the 5th International Conference on Indonesian Social and Political Enquiries, ICISPE 2020, 9-10 October 2020, Semarang, Indonesia*.
- Refni, N., & Abdul, R. (2022). Integrasi Politik di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Ilmiah Politik*, 22(1), 1-15.
- Tjandra, M., Ginting, S., & Rahmat, A. (2023). The Implementation of Pancasila and Civic Education Building A Harmonious Life in Bhinneka Tunggal Ika. *KnE Social Sciences*, 187-197.
- Tonton, H., Suyanto, S., & Gunawan, I. (2015). Bentuk-bentuk Keterlibatan Politik Kaum Muda Melalui Media Sosial. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-12.

- Ubaedillah, A. (2018). Civic education for Muslim students in the era of democracy: Lessons learned from Indonesia. *The Review of Faith & International Affairs*, 16(2), 50-61.
- Usmia, R. (2023, May). The Innovation of Civic Education Studies in Indonesia: A Theoretical Review of Global Citizenship Education. In *1st UMSurabaya Multidisciplinary International Conference 2021 (MICon 2021)* (pp. 584-596). Atlantis Press.